

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SMA Negeri 3 Purwokerto, Implementasi belum optimal dan ternyata implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor Standar dan Tujuan Kebijakan MBG, Sumber Daya, Aktivitas implementasi dan Komunikasi, Karakteristik dari agen Pelaksana, Kondisi Ekonomi, sosial dan Politik Kelompok Sasaran dan Kecenderungan Sikap para pelaksana. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi Program MBG di SMA Negeri 3 Purwokerto

a. Kesesuaian Pelaksanaan dengan Tujuan Kebijakan MBG

Pelaksanaan Program MBG di SMA Negeri 3 Purwokerto telah sesuai dengan tujuan kebijakan, khususnya dalam hal cakupan sasaran dan realisasi perencanaan. Program menjangkau seluruh peserta didik tanpa diskriminasi, baik siswa pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler, dan dilaksanakan secara konsisten sesuai jumlah penerima manfaat yang telah ditetapkan. Namun demikian, belum adanya diferensiasi menu antara siswa KKO dan siswa kelas reguler menunjukkan bahwa kesesuaian tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai pada aspek kualitas layanan, mengingat kebutuhan gizi siswa KKO yang memiliki aktivitas fisik lebih tinggi.

b. Hasil Respon Pelaksanaan Program MBG

Respon terhadap pelaksanaan Program MBG cenderung positif baik dari peserta didik maupun pelaksana program. Program ini dirasakan membantu mencukupi kebutuhan gizi serta meningkatkan motivasi kehadiran siswa, baik pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang

mampu. Meskipun demikian, variasi kualitas menu serta belum adanya penyesuaian menu berdasarkan kebutuhan gizi siswa KKO dan siswa kelas reguler, serta belum optimalnya evaluasi dampak jangka panjang, menyebabkan respon positif tersebut belum sepenuhnya merata.

2. Standar dan Tujuan Kebijakan MBG di SMA Negeri 3 Purwokerto

a. Kejelasan Tujuan Kebijakan MBG

Kejelasan tujuan kebijakan MBG belum sepenuhnya dipahami secara merata, khususnya oleh peserta didik sebagai penerima manfaat, baik pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler. Program ini masih lebih banyak dipersepsikan sebagai pembagian makanan gratis dibandingkan sebagai strategi peningkatan gizi jangka panjang bagi siswa. Kondisi tersebut berdampak pada keberhasilan penilaian program yang cenderung masih terfokus pada aspek operasional jangka pendek, seperti distribusi makanan dan jumlah penerima manfaat, dibandingkan pada dampak peningkatan status gizi peserta didik.

b. Standar Penerapan Kebijakan MBG

Standar penerapan kebijakan MBG belum berjalan optimal di tingkat sekolah. Meskipun pedoman teknis telah tersedia, keterbatasan sosialisasi dan akses terhadap pedoman tertulis menyebabkan pelaksanaan program lebih bergantung pada arahan teknis dari SPPG. Selain itu, mekanisme pengawasan yang belum terintegrasi menyebabkan konsistensi standar penerapan belum berjalan optimal, termasuk dalam penyediaan kebutuhan gizi peserta didik pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler.

3. Sumber Daya pada program MBG

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program MBG secara kuantitas telah mencukupi, baik di tingkat SPPG maupun sekolah. Namun secara kualitas masih terdapat keterbatasan, terutama pada kompetensi tenaga pengolahan makanan akibat kebijakan rekrutmen nonspesialis serta keterbatasan pelatihan yang diberikan. Kondisi ini mempengaruhi kualitas penyediaan menu makanan bagi peserta didik, baik pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler, sehingga menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi siswa.

b. Sumber Daya Finansial

Ketersediaan anggaran Program MBG dinilai cukup untuk mendukung pelaksanaan program sesuai standar gizi bagi peserta didik. Anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi siswa, baik pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler. Namun demikian, kecukupan anggaran tersebut berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan apabila tidak diimbangi dengan transparansi dan pengawasan keuangan yang konsisten. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pemanfaatan anggaran guna mendukung penyediaan kebutuhan gizi peserta didik secara optimal.

c. Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu dalam pelaksanaan Program MBG telah dikelola secara sistematis dan adaptif. Pembagian waktu kerja yang jelas antara SPPG dan pihak sekolah memungkinkan program berjalan tanpa mengganggu proses, baik bagi peserta pembelajaran di Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler. Meskipun demikian,

disiplinan pelaksana program dan peserta didik tetap menjadi faktor penting agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga pendistribusian dan konsumsi makanan dapat berlangsung secara tertib dan efisien.

4. Aktivitas implementasi dan Komunikasi antar organisasi Program MBG

a. Koordinasi dan Penyampaian Informasi program MBG

Koordinasi antar pelaksana Program MBG telah berjalan cukup baik, khususnya antara SPPG dan pihak sekolah dalam mendukung pelaksanaan program bagi peserta didik pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler. Namun penyampaian informasi kepada orang tua siswa masih belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa koordinasi internal yang relatif baik belum sepenuhnya diimbangi dengan komunikasi eksternal yang terbuka dan merata kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama orang tua sebagai pihak yang turut berperan dalam pemantauan kelengkapan gizi peserta didik.

b. Kerjasama dan Hubungan Antar Pelaksana program MBG

Kerjasama dan hubungan antar pelaksana Program MBG menunjukkan perkembangan yang positif. Koordinasi lintas sektor antara SPPG dan pihak sekolah, serta sinergi internal di lingkungan sekolah, mampu mendukung kelancaran terlaksananya program bagi peserta didik pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler. Hubungan kerja yang harmonis tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas serta keberlangsungan implementasi program di lapangan.

5. Karakteristik dari agen Pelaksana/implementor Program MBG

a. Struktur dan Koordinasi Organisasi Pelaksana Program MBG

Struktur organisasi pelaksana Program MBG telah terbentuk dengan pembagian tugas yang relatif jelas. Koordinasi antar instansi berjalan melalui mekanisme pelaporan dan komunikasi secara berjenjang.

Namun demikian, perbedaan pemahaman dan kapasitas pelaksana masih menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penerapan tugas, khususnya pada aspek teknis dan administratif dalam pelaksanaan program bagi peserta didik pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler.

b. Kapasitas Organisasi Pelaksana Program MBG

Kapasitas organisasi pelaksana Program MBG dapat dinilai cukup baik dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Keterbatasan sarana dan prasarana belum secara signifikan menghambat keberlangsungan program karena didukung oleh kemampuan adaptasi dan koordinasi antar pelaksana dalam melayani peserta didik, baik pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler. Namun demikian, peningkatan kapasitas organisasi tetap memerlukan penguatan fasilitas pendukung serta pelaksanaan evaluasi formal secara berkala guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

6. Kondisi Ekonomi, sosial dan Politik Kelompok Sasaran Program MBG

a. Pendapatan Kelompok Sasaran Program MBG

Pendapatan kelompok sasaran tidak mempengaruhi akses terhadap Program MBG karena kebijakan ini bersifat universal dan ditujukan bagi seluruh peserta didik. Program ini memberikan manfaat ekonomi langsung bagi siswa, baik pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu, karena dapat mengurangi beban pengeluaran konsumsi harian. Selain itu, program ini juga memberikan dampak ekonomi tidak langsung bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan energi kerja serta pemanfaatan bahan pangan lokal dalam proses penyediaan makanan.

b. Kepemilikan Kelompok Sasaran Program MBG

Kepemilikan harta bergerak maupun tidak bergerak tidak menjadi dasar penentuan penerima manfaat Program MBG. Seluruh peserta didik, baik pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler, memperoleh hak yang sama tanpa perbedaan kondisi ekonomi. Pendekatan ini memperkuat prinsip keadilan dan pemerataan dalam pelaksanaan program, sekaligus menghindari peserta didik dari potensi stigma sosial yang dapat muncul akibat perbedaan latar belakang ekonomi.

7. Kecenderungan Sikap para pelaksana/implementor Program MBG

a. Posisi Sosial Pelaksana Program MBG

Posisi sosial pelaksana Program MBG terutama diwujudkan melalui forum formal yang melibatkan pihak sekolah, SPPG, dan wali murid dalam mendukung pelaksanaan program bagi peserta didik pada Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler. Forum nonformal belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Meskipun demikian, dukungan sosial dari masyarakat tetap berperan penting dalam membangun penerimaan serta legitimasi terhadap pelaksanaan Program MBG di lingkungan sekolah.

b. Dukungan Pemerintah terhadap Program MBG

Dukungan pemerintah terhadap Program MBG diwujudkan melalui kebijakan nasional, pengawasan, pembentukan Satgas MBG, serta koordinasi lintas sektor di tingkat daerah. Sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan dukungan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan, kualitas, dan stabilitas pelaksanaan Program MBG bagi peserta didik di Kelas Khusus Olahraga (KKO) maupun kelas reguler di SMA Negeri 3 Purwokerto.

Secara keseluruhan pelaksanaan Program MBG di SMA Negeri 3 Purwokerto telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan mendukung pemerataan akses gizi bagi siswa. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal, terutama pada aspek kualitas layanan, diferensiasi kebutuhan gizi khususnya bagi siswa KKO konsistensi standar pelaksanaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sistem evaluasi dan pengawasan yang lebih komprehensif. Meskipun secara umum program telah mampu menjangkau seluruh sasaran, pada aspek standar kesesuaian dan respon terhadap kebutuhan peserta masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat optimalisasi program. Program MBG di SMA Negeri 3 Purwokerto diberikan secara merata kepada siswa KKO (Kelas Khusus Olahraga) maupun siswa reguler, sehingga tidak terdapat perbedaan signifikan dalam penerapannya dibandingkan dengan sekolah lain. Namun demikian, sekolah memiliki keunggulan berupa program internal yang menyediakan tambahan makanan berkarbohidrat khusus bagi siswa KKO. Melalui program tersebut, pelaksanaan MBG dapat lebih mendukung memenuhi kebutuhan energi sekaligus menunjang kinerja olahraga siswa KKO secara lebih optimal.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka pemaksaan teknis yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan standar dan tujuan kebijakan, dengan melakukan sosialisasi terstruktur kepada siswa dan orang tua mengenai tujuan jangka panjang Program MBG sebagai intervensi peningkatan gizi. Standar kebutuhan gizi perlu disesuaikan dengan karakteristik siswa, termasuk penyusunan pedoman khusus untuk kelas KKO;
2. Pengembangan menu yang bervariasi, khususnya bagi siswa kelas KKO, melalui perencanaan kebutuhan kalori dan protein yang lebih tinggi sesuai aktivitas fisik mereka, tanpa mengabaikan standar gizi bagi siswa reguler;

3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia , melalui pelatihan berkala terkait manajemen gizi, keamanan pangan, dan penyusunan menu berdasarkan kebutuhan spesifik peserta didik;
4. Penguatan transparansi dan pengawasan anggaran, melalui mekanisme pelaporan rutin dan evaluasi internal agar penggunaan dana efektif dan akuntabel;
5. Penguatan komunikasi eksternal, khususnya kepada orang tua dan wali murid, termasuk membuka ruang dialog terkait kebutuhan gizi siswa KKO serta evaluasi pelaksanaan program;
6. Pelaksanaan evaluasi secara berkala berbasis dampak, tidak hanya pada aspek distribusi makanan, tetapi juga pada indikator gizi, kebugaran siswa (khususnya kelas KKO), serta program dampak sosial ekonomi.

Dengan demikian, Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program distribusi makanan gratis, tetapi dapat berkembang menjadi kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih adaptif terhadap karakteristik peserta didik, termasuk kebutuhan khusus kelas KKO.